BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membiayai pengeluaran pemerintah yang rutin maupun yang tidak rutin, negara memperoleh penerimaan tentang pajak, bea cukai, retribusi, dan sumbangan, keuntungan yang diperoleh dari BUMN, pinjaman dari dalam maupun dari luar negeri dan lain-lain. Dari sekian banyak sumber penerimaan negara, sumber penerimaan negara yang terbesar adalah sector pajak.

Salah satu jenis pajak saebagai penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). PPh 21 merupakan pajak langsung yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi tersebut.

Sekretariat Daerah merupakan instansi pemerintah yang dijalankan oleh sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana merupakan wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya dikenakan pajak penghasilan yang sifatnya pegawai tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penghasilan pegawai tersebut dikenakan pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut langsung oleh bendaharawan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Wajib melaporkan jumlah pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawainya setiap berakhirnya masa pajak dan cukup diisikan ke formulir SPT masa PPh 21/26 dan Surat Setoran Pajak (SSP).

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas tentang peranan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) pada Sekretariat Daerah dengan mengangkat judul **“Penerapan Perhitungan,**

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pegawai Sekretariat Kabupaten MukoMuko Bengkulu ".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka penulis merumuskan tentang beberapa masalah tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu :

1. Bagaimana penerapan PPh pasal 21 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko menyangkut prosedur perhitungan, pemotongan, pemungutan serta pelaporan pajak ?
2. Apakah prosedur yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku berhubungan dengan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap ?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan dari kegiatan magang ini antara lain:

1. Memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa DIII Akuntansi untuk mengikuti magang yang merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Fakultas Ekomomi Universitas Andalas.
3. Untuk menulis laporan tugas akhir sebagai prasyarat ujian kompre
4. Agar dapat mengaplikasikan ilmu yang di peroleh pada bangku perkuliahan
5. Melatih kemapuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain yang mempunyai disiplin ilmu dan karakter yang berbeda

1.4 Manfaat Magang

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Adapun manfaat kegiatan magang ini antara lain:

1. Untuk dapat mempersiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan pada masa yang akan datang.
2. Agar perusahaan dapat menjadikan pembahasan ini sebagai acuan dalam perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21
3. Menumbuhkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan yang diberikan yang berguna di masa yang akan dating.
4. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain dengan melihat dunia kerja yang sebenarnya.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan Kantor Sekretariat Kabupaten Mukomuko Bengkulu selama 40 hari kerja yang dimulai tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan selesai.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematik penulisan proposal magang ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tempat dan waktu pelaksanaan magang, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan pembahasan teoritis tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan dalam mengemukakakan permasalahan yang akan dibahas dalam laporan magang ini seperti konsep perpajakan, fungsi dan jenisjenis pajak, subjek dan objek pajak penghasilan PPh Pasal 21,

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

waktu pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21, dan cara penghitungan PPh Pasal 21.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan dimulai dari latar belakang berdirinya perusahaan dan perkembangannya, struktur organisasi perusahaan, serta uraian tugas dari struktur organisasi perusahaan tsb.

BAB IV : URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini menjelaskan tentang uraian permasalahan mengenai bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian menyesuaikan perhitungan menurut perusahaan dengan menurut peraturan perpajakan di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA